

Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Lombang Kabupaten Majene “Social Capital of Community Forest Management in Lombang Village Majene Regency”

Andi Arafat¹ Andi Irmayanti Idris¹ Andi Ridha Yayank Wijayanti¹

¹Program Studi Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat, Majene

*Email : andi.arafat@unsulbar.ac.id

ABSTRAK: Pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial/masyarakat. Munculnya pengelolaan sumber daya alam ketika ada interaksi (teratur dan berkelanjutan) di antara anggota masyarakat yang terwujud dalam modal sosial, seperti kepercayaan sosial, norma sosial dan jejaring sosial yang memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Lombang, Kabupaten Majene, provinsi Sulawesi Barat. Ini penting untuk pengembangan modal sosial (norma, rasa saling percaya, dan jejaring sosial) yang ada dalam masyarakat pengelola hutan. Selanjutnya, melihat hubungan dan peran modal sosial dalam pengembangan hutan kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial dalam pemilik / pengelola hutan dikenal sebagai kategori tinggi karena masyarakat memiliki asosiasi informal yang lebih kuat dan memiliki nilai-nilai kolektif, norma dan etika sebagai komunitas yang saling berhubungan. Komunitas dengan modal sosial yang tinggi akan terselesaikan. Adanya rasa saling percaya, dukungan dan kolaborasi dapat menciptakan jaringan baik di dalam kelompok komunitas mereka dan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Hutan masyarakat, modal sosial, pengelolaan

ABSTRACT: Community forest management cannot be separated from social/communal conditions. Emerging Natural Resource Management arises This occurs when there are interactions (regular and ongoing) between community members that are manifested in social capital such as social trust, social norms, and social networks that have a relationship with community welfare. The study was conducted in Lombang Village, Majene Regency, West Sulawesi Province. This is important for the development of social capital (norms, mutual trust, and social networks) that exist in forest management people. Then, look at the relationship and role of social capital in community forest development. The results of the study show that social capital in the forest owner / manager is referred to as a high category because the community has informal associations that are stronger and have collective values, norms and ethics as an interconnected community. Communities that have high social capital will be resolved. The existence of mutual trust, support, and collaboration they can build networks both within their community groups and with other community groups.

Keyword: Community forest, social capital, management

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan rakyat tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat/komunal tempat hutan rakyat berada. Kajian-kajian tentang pengelolaan sumberdaya pertanian dan kehutanan oleh masyarakat telah cukup banyak dilakukan dan menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda tentang kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan (Suharjito & Saputro, 2008) namun nilai sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, *property rights* (hak-hak penguasaan sumberdaya hutan), dan kapasitas masyarakat menentukan keberhasilan pengelolaan hutan. Menurut Nopiansyah (2017) menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat

atau komunal muncul ketika terdapat kesepakatan pemanfaatan bersama di antara anggotanya. Kesepakatan ini bisa terjadi karena terdapat interaksi (regular dan berkesinambungan) antara anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Sejalan dengan Palletto dkk (2012) bahwa modal sosial dikembangkan oleh ilmu sosial dapat diterapkan sebagai struktur pendukung dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya alam.

Modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. Kebijakan pengurangan kemiskinan tidak hanya terkait dengan peningkatan modal ekonomi, tetapi juga perluasan akses terhadap modal sosial. Akses rumah tangga miskin terhadap modal sosial dapat memfasilitasi peningkatan akses modal ekonomi melalui transmisi informasi, peluang kerja sama (perluasan jejaring sosial), dan sikap saling percaya (Nasution, 2016).

Putnam (1993) mempopulerkan konsep modal sosial kepada berbagai kalangan, Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Hal ini didasari atas tiga alasan penting yaitu. **Pertama**, adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. **Kedua**, kepercayaan (trust) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. **Ketiga** berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat (Syahra, 2003).

Modal sosial dengan wujud nyata seperti kepercayaan sosial, norma sosial, serta jaringan sosial memiliki pengaruh terhadap produktivitas hutan rakyat. Memahami dan menyadari bahwa pengelolaan hutan rakyat melalui modal sosial yang telah dimiliki oleh masyarakat sebagai pelaku sangatlah penting. Bagaimanapun prinsip dasar dari modal sosial adalah bahwa hanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama yang dapat maju dan

berkembang dengan kekuatan sendiri. Modal sosial sebagai akumulasi dari unsur dan nilai sosial yang saling terkait akan dapat meningkatkan tindakan kolektif saling menguntungkan di tengah masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat

Bagaimana upaya percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat sebagai salah satu langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan hutan rakyat (ekologis dan ekonomis) dan bagaimana konsep modal sosial dapat diaplikasikan untuk mendukung hal tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lombang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, beberapa pengelola/pemilik hutan rakyat yang ada dipilih dengan cara *purposive* berdasarkan keberadaan komunitas masyarakat yang mengelola hutan rakyat. Pengambilan data, pengamatan di lapangan dilaksanakan dari bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, obeservasi dan pencatatan data sekunder. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan besarnya tingkat modal sosial (rendah, sedang, tinggi) dalam mendukung pengelolaan hutan rakyat dilakukan dengan (Umar, 2005):

$$\text{Selang Nilai} = \frac{\text{Selisih Skor Total Tertinggi dan Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Jumlah kelas yang diinginkan yaitu 3 kelas (rendah, sedang, tinggi). Adapun jumlah responden pada masing-masing komunitas hutan rakyat adalah sebanyak 22 responden. Nilai untuk setiap pertanyaan pada responden adalah yang terendah (1), sedang (2), dan yang tertinggi (3). Secara rinci cara pengukuran tingkat modal sosial pada masing-masing komunitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Cara Pengukuran Modal Sosial

No.	Modal sosial	Jumlah pertanyaan	Jawaban Responden		Total Nilai (22 Responden)	Selang kelas	Tingkat Modal Sosial Komunitas	
			Kriteria	Nilai			Kelas	Skor
1	Peranan	7	Rendah	1	(22x7x1) s/d	103	Rendah	154 - 256
			Sedang	2	(22x7x3)		Sedang	257 - 359
			Tinggi	3	154 s/d 462		Tinggi	360 - 462
2	Aturan	10	Rendah	1	(22x10x1) s/d	147	Rendah	220 - 366
			Sedang	2	(22x10x3)		Sedang	367 - 513
			Tinggi	3	220 s/d 660		Tinggi	514 - 660
3	Jaringan	6	Sempit	1	(22x6x1) s/d	88	Rendah	132 - 219
			Sedang	2	(22x6x3)		Sedang	220 - 307
			Luas	3	132 s/d 396		Tinggi	308 - 396
	Struktural	7+10+6	(22x23x1) s/d (22x23x3)			337	Rendah	506 - 843

		=23		506 s/d 1518			Sedang	844 - 1181
							Tinggi	1182 - 1518
4	Kepercayaan	13	Tidak Percaya	1	(22x13x1) s/d (22x13x3) 286 s/d 858	191	Rendah	286 - 476
			Ragu-ragu	2			Sedang	477 - 667
			Percaya	3			Tinggi	668 - 858
5	Solidaritas	2	Lemah	1	(22x2x1) s/d (22x2x3) 44 s/d 132	29	Rendah	44 - 72
			Sedang	2			Sedang	73 - 101
			Kuat	3			Tinggi	102 - 132
Kognitif		13+2 =15		(22x15x1) s/d (22x15x3) 330 s/d 990	220	Rendah	330 - 549	
						Sedang	550 - 769	
						Tinggi	770 - 990	

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Modal Sosial Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Lombang

1. Peranan

Peranan yang berjalan sesuai fungsi yang diemban oleh para pihak yang ada dalam masyarakat sehingga mampu mendukung empat fungsi dasar dan kegiatan yang diperlukan untuk tindakan kolektif, yaitu pembuatan keputusan, mobilisasi dalam pengelolaan sumberdaya, komunikasi dan koordinasi, serta resolusi konflik. Ada dua tingkat peranan yang ditinjau. Pertama, tingkat peranan tokoh informal yaitu tokoh petani, tokoh agama dan tokoh pedagang pengumpul. Kedua, tingkat peranan lembaga formal, yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Kepala Desa dan Pemerintah Kecamatan. Hasil penelitian terkait peranan dalam pengelolaan hutan rakyat dapat disajikan pada Tabel. 2.

Tabel 2. Distribusi Responden menurut Tingkat Peranan para Pihak dalam Pengelolaan Hutan Rakyat.

No	Para Pihak	Tingkat Peranan		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1	Individu (Informal)			
a.	Tokoh Petani	0	0	100
b.	Tokoh Agama	70	30	0
c.	Pedagang Pengumpul	5	25	70
2	Lembaga (Formal)			
a.	Dinas Kehutanan	15	60	25
b.	Dinas pertanian	15	25	60
c.	Lurah/ Kepala Desa	0	70	30
d.	Pemerintah Kecamatan	50	50	0

Tingkat peranan para pihak yang terlibat mendukung pengelolaan hutan rakyat di Desa Lombang kabupaten Majene kategori informal masuk pada tingkat peranan tinggi adalah tokoh petani sebesar 100 % dan pedagang pengumpul sebesar 70% namun pada tokoh agama peranan berada pada kategori rendah sebesar 70%. Hal ini menunjukkan yang berperan tinggi dalam sub sistem produksi dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan sampai tahap pemanenan yang pembuatan keputusan, mobilisasi dan pengelolaan sumberdaya, komunikasi dan koordinasi, dan resolusi konflik berada ditingkat petani. Hal ini lazim ditemui pada setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, pengelola yang mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan utama (Maguire dkk, 2012) Keterlibatan petani pengelola hutan rakyat sangat penting dalam mempertahankan kelestarian hutan rakyat. Hal ini sangat ditunjang oleh kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan penggunaan tenaga kerja terkait pemeliharaan. Sistem pemeliharaan hutan rakyat sebahagian dilakukan dengan metode penggiliran kerja pada tiap lahan yang dikerjakan oleh petani secara berkelompok. Petani yang mendapatkan giliran lahannya dikerjakan berkewajiban meangung makan dan minum ataupun memberikan upah.

Selain pelaksanaan kegiatan pemasaran, pedagang pengumpul juga berperan tinggi pada pemeliharaan hutan rakyat dalam hal pemberiaan pinjaman modal terkait kebutuhan obat dan pupuk petani. Kebanyakan pedagang pengumpul memiliki usaha (toko), dimana petani dapat meminjam segala kebutuhan dengan kewajiban menjual hasil hutan rakyat dan pertaniannya kembali kepada pedagang pengumpul. Pelunasan pinjaman dipotong dari harga penjualan hasil hutan rakyat . Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden selain mengkonsumsi hasil panen sendiri juga memilih untuk menjual hasil panen ke pedagang pengumpul. Peran tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat berperan rendah, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan hutan rakyat.

Pihak formal juga memiliki peranan dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Lombang yang memiliki tingkat peranan yang berbeda-beda, seperti 60% responden beranggapan Dinas Kehutanan berada pada tingkat peranan sedang sedangkan dinas Pertanian 60% responden beranggapan berperan tinggi. Peran pemerintah daerah seperti kepala desa dan pemerintah kabupaten masing 70% dan 50%, masuk pada kategori sedang atau cukup berperan dalam pembinaan, memfasilitasi dan mendukung program-

program yang datang dari tingkat provinsi maupun dari tingkat pusat. Pada dasarnya hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan peran para pihak yang terlibat dalam mendukung pengelolaan hutan rakyat di Desa Lombang sudah ada baik peran pihak informal maupun pihak formal.

2. Aturan

Peran dan aturan untuk pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya sangat penting dalam melakukan tindakan kolektif. Aturan (rules) dan peranan (roles) mendukung empat fungsi dasar dan kegiatan yang diperlukan untuk tindakan kolektif. Norma informal dan aturan formal dianggap sebagai landasan oleh para stakeholder dalam tata kelola hutan (Coleman, 1990). Pada petani hutan rakyat di Desa Lombang terdapat aturan, nilai, norma, kesepakatan dan tata kelakuan lainnya yang menjadi pedoman bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat. Secara ringkas distribusi responden menurut tingkat aturan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Responden menurut Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, Kepatuhan, Pelanggaran dan Sanksi terhadap Aturan dalam Pengelolaan Hutan Rakyat.

No	Jenis Aturan	Tingkat Aturan		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1	Aturan Tertulis			
	a. Pengatahuan	9	23	68
	b. Pemahaman	9	23	68
	c. Kepatuhan	0	9	91
	d. Pelanggaran	0	0	100
	e. Sanksi	0	0	100
2	Aturan Tidak Tertulis			
	a. Pengatahuan	0	0	100
	b. Pemahaman	0	9	91
	c. Kepatuhan	0	0	100
	d. Pelanggaran	0	0	100
	e. Sanksi	0	0	100

Tingkat pengetahuan dan pemahaman petani terhadap aturan tertulis masuk tergolong tinggi meskipun dengan persentase masing-masing sebesar 68% sedangkan pada aturan tidak tertulis tingkat pengetahuan juga tergolong tinggi masing-masing sebesar 100% dan 91%. Hal ini menunjukkan bahwa petani mengetahui dan paham terhadap aturan, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Persentase tingkat pengetahuan

dan pemahaman aturan tertulis lebih dibawah dari aturan tidak tertulis hal ini dikarenakan aturan tidak tertulis berupa nilai, norma, kesepakatan dan tata kelakuan lainnya merupakan pedoman utama bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat.

Tingkat kepatuhan dan pelanggaran petani terhadap aturan tertulis dan aturan tidak tertulis tergolong tinggi, kepatuhan dan pelanggaran pada aturan tertulis masing-masing sebesar 91% dan 100%. Sedangkan pada aturan tertulis kepatuhan dan panggarannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa petani patuh terhadap aturan, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Persentase kedua aturan tersebut meski tak beda jauh tapi aturan tidak tertulis lebih tinggi dari aturan tertulis Hal ini menunjukkan bahwa petani lebih mematuhi nilai, norma, kesepakatan dan kebiasaan yang ada dimasyarakat tetapi mereka juga cukup mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah namun terkendala pada pengetahuan dan pemahaman tentang aturan tersebut. Tingkat sanksi yang diterima petani atas pelanggaran terhadap aturan tertulis dan aturan tidak tertulis adalah tergolong tinggi masing-masing sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa petani tidak pernah mendapat sanksi apapun. Hal ini berdasarkan Tabel 6. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan petani terhadap aturan berada pada kriteria tinggi. Aturan/norma sosial menggariskan suatu keharusan, larangan, pantangan, tanggung jawab, kewajiban, hak dan peranan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Norma-norma informal memainkan peran kunci dalam implementasi (Borg dkk, 2015). Norma sosial dapat menjadi modal utama dalam pembangunan hutan rakyat karena jika dalam suatu komunitas, norma tumbuh dan dipertahankan secara kuat akan memperkuat masyarakat dalam ikatan modal sosial. Adanya norma akan mengatur hubungan kerjasama diantara anggota masyarakat contohnya adanya aturan adat yang mengatur pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sangat mendukung pengelolaan hutan di Laos (Hyakumura dkk, 2006).

3. Jaringan

Jaringan baik formal maupun informal sebagai pola pertukaran dan interaksi sosial yang terus berkembang merupakan perwujudan penting dari modal sosial. Pertukaran dan aliran informasi adalah suatu keharusan dalam fungsi jaringan (Borg dkk, 2014). Sebagai sebuah bentuk organisasi sosial, jaringan mewakili kategori modal sosial struktural. Jaringan merupakan hal yang berharga dalam manajemen sumber daya alam, dimana banyak kepentingan yang ada didalamnya (Harshaw dan Tindall, 2005). Tujuan utama

dari analisis jaringan untuk melihat bagaimana tindakan bersama yang dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya (Prell dkk, 2009). Lebih lanjut distribusi tingkat jaringan responden dengan para pihak yang mendukung pengelolaan hutan rakyat berdasarkan indikator jaringan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Tingkat Jaringan Responden dengan para Pihak yang mendukung Pengelolaan Hutan Rakyat berdasarkan Indikator Jaringan

No	Indikator	Tingkat Jaringan		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1	Keterbukaan organisasi/ lembaga formal	10	65	25
2	Intensitas kunjungan kepada keluarga/ sanak famili dalam satu desa	0	0	100
3	Intensitas kunjungan kepada tetangga	0	10	90
4	Intensitas pertemuan anggota komunitas	5	70	25
5	Negosiasi pemasaran hasil panen	0	80	20
6	Kepadatan organisasi/perkumpulan yang diikuti	60	40	0

Tingkat keeratan hubungan antara petani dengan lembaga formal masuk pada tingkat sedang dengan persentase sebesar 65% karena sekalipun tanpa ada ikatan organisasi/lembaga formal, responden tidak pernah merasakan ada kendala yang berarti atau masalah berat dalam mengelola hutan rakyat, keterbukaan dengan lembaga formal berada pada tingkatan sedang juga dikarenakan responden merasa belum perlu membentuk organisasi/lembaga formal dalam pengelolaan hutan rakyat., sedangkan tingkat keeratan hubungan petani dengan internal kelompok seperti keluarga dan sesama petani serta kunjungan kepada tetangga masuk pada kategori tingkat jaringan tinggi masing-masing sebesar 100% dan 90%. Ini menunjukkan kepada bahwa interaksi antar warga masyarakat baik sesama pengelola hutan rakyat maupun dengan masyarakat bukan pengelola hutan rakyat yang masih dalam satu desa sangat tinggi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sifat jaringan yang terbentuk adalah informal. Pertemuan anggota komunitas berada pada tingkat sedang sebesar 70% hal ini diikuti dengan persentase kepadatan organisasi/ perkumpulan yang diikuti tergolong rendah sebesar 60%. Sementara tingkat hubungan antara petani dengan para pengumpul untuk pemasaran hasil panen sebesar 80% namun pada kategori sedang karena sebagian petani terkadang lebih memilih untuk menjual langsung.

4. Kepercayaan

Kepercayaan memastikan individu akan mendapatkan sesuatu dari orang lain kepercayaan mempengaruhi anggota masyarakat untuk terlibat dalam tindakan kolektif. Beberapa studi empiris memperkuat bahwa kepercayaan sebagai unsur kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam (Baral, 2012) karena kepercayaan itu mengurangi ketidakpastian tentang kemungkinan perilaku orang lain atau terhadap imbalan dari sebuah kerjasama. Penentuan kepercayaan yang diuraikan berikut ini dinilai dengan 8 indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Responden menurut Tingkat Kepercayaan kepada para Pihak, Fungsi Aturan dan Jaringan

No	Indikator Kepercayaan	Tingkat Kepercayaan		
		Tidak percaya (%)	Ragu-ragu (%)	Percaya (%)
Kepercayaan responden terhadap:				
1	Pihak Informal (Individu)			
	a. Tokoh Petani	14	68	18
	b. Tokoh Agama	0	0	100
	c. Pedagang Pengumpul	18	50	32
2	Pihak Formal (Lembaga)			
	a. Dinas Kehutanan	20	30	50
	b. Dinas pertanian	0	20	80
	c. Kepala Desa	3	4	93
	d. Pemerintah Kecamatan	10	60	30
3	Kepercayaan responden terhadap fungsi aturan tertulis	10	60	30
4	Kepercayaan responden terhadap fungsi aturan tidak tertulis	0	0	100
5	Manfaat hutan rakyat	0	0	100
6	Hubungan sosial dalam mengelola Hutan Rakyat	0	15	85
7	Fungsi Hubungan Sosial dalam memudahkan pekerjaan	0	0	100
8	Kemampuan untuk bekerjasama dalam pengelolaan hutan rakyat	10	60	30

Tingkat kepercayaan sebagian besar petani terhadap peran dan posisi pihak petani lain berada pada tingkat sedang (ragu-ragu) dengan persentase 68%. Hal ini dikarenakan pada proses perencanaan, penanaman, pemeliharaan sampai tahap pemanenan

sebagian besar petani memilih melakukannya secara sendiri-sendiri, peminjaman peralatan maupun kerjasama dalam memanen hasil untuk pengelolaan hutan rakyat hanya dilakukan diwaktu tertentu saja dan dianggap akan menambah beban biaya. Tingkat kepercayaan pada tokoh agama masuk pada kategori percaya yaitu 100% namun, kepercayaan ini bukan dalam bentuk pengelolaan hutan rakyat bersama tetapi lebih mengarah pada kepercayaan nilai keagamaan, kepercayaan adanya petuah atau pelajaran baik yang diberikan tokoh agama untuk selalu berbuat baik atau berprasangka baik terhadap sesama, meskipun pada prakteknya hubungan kepercayaan antar sesama petani masih pada kategori ragu-ragu.

Tingkat kepercayaan petani terhadap pedagang lokal (pengumpul) sebagian besar masuk pada kategori ragu-ragu dengan persentase sebesar 50%. Hal ini lebih banyak ditunjang dengan penentuan harga hasil hutan rakyat yang dominan ditentukan oleh pedagang pengumpul. Akses informasi harga menurut responden kebanyakan hanya datang dari pedagang pengumpul dan keadaan ini tak dapat dihindari sebab peminjaman modal pengelolaan hutan rakyat (obat dan pupuk) sangat ditunjang dari pedagang pengumpul.

Kepercayaan petani terhadap pihak formal sebagian besar berada pada kategori tinggi (percaya) terhadap Dinas Kehutanan 50%, Dinas Pertanian 80%, dan Kepala Desa 93%. Namun tingkat kepercayaan pada pemerintah kecamatan masuk pada kategori ragu-ragu dengan persentase sebesar 60%. Persentase tingkat kepercayaan responden kepada masing-masing lembaga formal yang belum maksimal disebabkan karena selama ini dirasakan belum optimalnya peran dari masing-masing lembaga tersebut

Tingkat kepercayaan petani terhadap fungsi aturan tertulis (peraturan pemerintah) masuk pada kategori ragu-ragu dengan persentase 60% hal ini menunjukkan bahwa petani kurang mengetahui dan paham terhadap aturan tersebut (kurangnya sosialisasi aturan). Kondisi ini menjadikan aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah belum terinternalisasi sebagai nilai-nilai yang diakui, dipatuhi, dan dijadikan pedoman bertindak petani, dan pada sisi lain belum terbukti dapat berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan dan peningkatan hasil hutan rakyat dengan baik.

Tingkat kepercayaan petani pada aturan tidak tertulis masuk pada kategori percaya dengan persentase 100% hal ini dikarenakan bahwa fungsi aturan tidak tertulis berupa kesepakatan dan kebiasaan yang sudah membudaya, petani mengetahui dan paham

terhadap aturan tersebut, petani juga patuh dalam melaksanakan aturan tersebut. Hal ini karena aturan tidak tertulis sudah menjadi kebiasaan yang melekat, membudaya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.

Tingkat kepercayaan responden terhadap manfaat hutan rakyat masuk pada kategori percaya dengan persentase 100%. Tingkat kepercayaan petani bahwa perlu adanya hubungan sosial dalam mengelola hutan rakyat berada pada kriteria percaya (85%). Hal ini diikuti dengan kepercayaan masyarakat 100% terhadap fungsi atau manfaat hubungan sosial yang akan memudahkan masyarakat dalam mengelola hutan rakyat. Namun pada prakteknya masyarakat kurang mampu bekerjasama dilihat dari tingkat kepercayaan sebesar 60% (ragu-ragu). Para petani kurang percaya atau masih ragu-ragu (sedang). Hal ini sangat ditunjang dengan seluruh praktek pengelolaan hutan rakyat masih dikerjakan sendiri-sendiri (personal). Olehnya itu, sebagaimana penelitian Guilen,dkk (2015) pentingnya mengenali hubungan pribadi dan peran lembaga lainnya dari penyatuan modal sosial untuk memahami situasi pengelolaan hutan. Keberadaan kelompok tani, juga masih berjalan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Inisiatif untuk membawa kelompok tani menjadi ruang yang dapat memberi optimalisasi manfaat terhadap hutan rakyat masih sangat kurang.

5. Solidaritas

Solidaritas merupakan wujud perhatian dan kepedulian dari petani. Penentuan solidaritas yang diuraikan berikut ini dinilai dengan 2 (dua) indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi responden menurut tingkat solidaritas dalam pengelolaan hutan rakyat

Tingkat Solidaritas				
No	Keeratan Hubungan/ Solidaritas dalam pengelolaan HR	Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1	Membagikan hasil panen secara cuma-cuma kepada tetangga/petani lain.	60	30	10
2	Menolong sesama petani/membantu tetangga/warga sekitar.	10	60	30

Penentuan solidaritas dengan melihat tingkat keeratan hubungan untuk membagi hasil secara cuma-cuma kepada tetangga atau petani lain berada pada tingkat solidaritas rendah dengan persentase 60%. Hal ini disebabkan oleh masyarakat pengelola hutan rakyat kebanyakan menjual hasil hutan rakyat mereka. Persentase dalam indikator

menolong atau membantu sesama petani untuk pengelolaan hutan rakyat berada pada kategori sedang dengan persentase 60%. Indikator ini menggambarkan masih adanya soliditas yang baik antar sesama petani. Bentuk ini terlihat jelas pada peristiwa-peristiwa perwakinan, hajatan dan sebagainya, dimana petani akan saling membantu. Dalam pengelolaan hutan rakyat soliditas ini juga dapat dilihat pada sistem penggiliran kerja membersihkan kebun, meskipun intensitas kegiatan ini sudah jarang terjadi. Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisis modal sosial, bahwa tingkat modal sosial komunitas hutan rakyat di Desa Lombang Kabupaten Majene disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Tingkat modal sosial komunitas petani hutan rakyat

No	Modal Sosial	Tingkat Modal Sosial Desa Lombang (Skore)
A Kategori Struktural		
1	Peranan	334 (sedang)
2	Aturan	634 (tinggi)
3	Jaringan	326 (tinggi)
Jumlah 1 + 2 + 3		1294 (tinggi)
B Kategori Kognitif		
1	Kepercayaan	705 (tinggi)
2	Solidaritas	82 (sedang)
Jumlah 1 + 2		787 (tinggi)

Tingkat modal sosial petani hutan rakyat di Desa Lombang kabupaten Majene kategori struktural dengan skore 1294 masuk pada tingkat tinggi, meskipun pada kategori peranan berada pada tingkat sedang dengan skor 334. Sedangkan pada kategori kognitif dengan skor 787 masuk pada tingkatan tinggi. Bentuk modal sosial (struktural dan kognitif) memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, bentuk yang satu mempengaruhi bentuk yang lain demikian Uphoff Mulyono (2012). Kedua kategori modal sosial (struktural dan kognitif) mempengaruhi perilaku masyarakat hingga mekanisme terbentuknya harapan/ekspektasi. Tingkat modal sosial akhirnya sangat dipengaruhi oleh persoalan mental masyarakat yang ada. Keadaan mental ini mengantar pengertian bahwa modal sosial kognitif lebih menentukan. Proses kognitif memberi pengaruh akan aturan, peranan, dan jaringan.

Upaya-upaya untuk terus meningkatkan modal sosial struktural dalam pengelolaan hutan rakyat perlu untuk digalakkan agar segala aturan, peranan, serta jaringan yang telah ada menjadi semakin solid, mapan dan berkembang untuk selanjutnya mampu berperan

lebih besar lagi dalam menstimulasi terciptanya tindakan kolektif masyarakat. Mengkoordinasikan berbagai usaha, menciptakan harapan, membuat kemungkinan berhasil lebih besar, dan menyediakan jaminan tentang bagaimana orang lain akan bertindak dan sebagainya dalam pengelolaan hutan rakyat adalah tindakan penting dalam menguatkan modal sosial yang telah ada di Desa Lombang, Kabupaten Majene.

3.2. Keterkaitan peranan modal sosial dalam pengembangan hutan rakyat

Tingginya tingkat modal sosial (struktural dan kognitif) yang ada mempengaruhi performansi pengelolaan hutan rakyat di Desa Lombang, Kabupaten Majene, modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial tumbuh dan berkembang melalui pewarisan nilai modal sosial, dilakukan dalam proses adaptasi, pembelajaran, serta pengalaman dalam praktek nyata. Tanpa hal tersebut modal sosial akan mengalami kepunahan (hilang).

Pada masyarakat Desa Lombang, selama proses penelitian ditemukan bahwa masyarakat memiliki asosiasi-asosiasi informal yang umumnya kuat dan memiliki nilai-nilai, norma, dan etika kolektif sebagai sebuah komunitas yang saling berhubungan. Hal ini merupakan modal sosial yang diharapkan dapat mendorong munculnya tindakan dalam pengelolaan hutan rakyat dengan prinsip keterbukaan, dan jaringan-jaringan informal dalam masyarakat yang secara mandiri mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama pemilik/pengelola hutan rakyat dalam kerangka pembangunan masyarakat. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Adanya saling percaya, toleransi, dan kerjasama mereka dapat membangun jaringan baik di dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Sejalan dengan Mifsud dkk (2016) mengemukakan bahwa modal sosial masyarakat dalam tata kelola hutan ditingkat lokal seperti aliran informasi, hubungan kekuasaan, kepercayaan akan mempengaruhi kerjasama dalam penggunaan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dan reorganisasi rantai nilai.

Penguatan modal sosial di Desa Lombang akan memudahkan saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan pengelolaan hutan rakyat. Dari titik tersebut

akan membawa lahirnya masyarakat yang peduli pada berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan, masyarakat yang saling memberi perhatian dan saling percaya. Modal sosial yang tinggi yang dimiliki para pengelola hutan rakyat di Desa Lombang merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif masyarakat dan memberikan daya tarik menarik yang jika diarahkan dengan tepat akan menghadirkan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika pengelolaan hutan rakyat.

Adanya norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani masyarakat Desa Lombang sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku yang ada saat ini tidak dapat menjamin kedepannya akan tetap ada sebagai modal sosial di dalam masyarakat secara umum dan pengelola hutan rakyat secara khusus. Peranan, aturan dan jaringan bersama (struktural) yang dibangkitkan oleh semangat kepercayaan dan solidaritas (kognitif) yang akan mampu mempertahankan eksistensi modal sosial yang ada pada masyarakat pengelola hutan rakyat di Desa Lombang.

Sejatinya modal sosial yang tinggi menekankan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya. Sikap partisipatif, saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, dan saling percaya mempercayai perlu dikembangkan dan dipertahankan untuk dianut oleh masyarakat pengelola hutan rakyat. Adanya interaksi orang lain dan faktor kelembagaan seperti kebebasan ekonomi dapat meningkatkan kepercayaan (Murtazashvili dkk, 2019).

Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lombang penting untuk diarahkan pada bagaimana bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama dalam bentuk hadirnya produktivitas dan kesejahteraan para pengelola hutan rakyat, kerjasama kekuatan ini akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Program pendampingan merupakan faktor yang tak dapat dipisahkan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat pengelola hutan rakyat yang ada di Desa Lombang melalui peningkatan ketrampilan pengelolaan, dan pengembangan kekuatan modal sosial yang telah dimiliki.

4. KESIMPULAN

Modal sosial pada masyarakat pemilik/pengelola hutan rakyat di Desa Lombang, Kabupaten Majene berdasarkan hasil pengukuran termasuk pada tingkat “tinggi”. Tingkat modal sosial struktural (skor 1294) yang diukur terdiri dari peranan dengan tingkat sedang (skor 334), aturan pada tingkat tinggi (skor 634) dan jaringan dengan skor 326 (tinggi). Sedangkan pada tingkat modal sosial kognitif yang diukur dari unsur kepercayaan (skor 705) berada pada tingkat “tinggi”, dan solidaritas (82), tergolong “sedang”. Tingkat modal sosial (struktural dan kognitif) yang ada mempengaruhi performansi pengelolaan hutan rakyat di Desa Lombang, Kabupaten Majene, modal sosial tersebut merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif masyarakat dan memberikan daya tarik menarik yang jika diarahkan dengan tepat akan menghadirkan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika pengelolaan hutan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baral, N., 2012. Empirical analysis of factors explaining local governing bodies' trust for administering agencies in community-based conservation. *J. Environ.Manag.*103, 41-50. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.02.031>
- Borg, R., Toikka, A., dan Primmer, E. 2014. Social capital and governance: a social network analysis of forest biodiversity collaboration in Central Finland. *Forest Policy and Economics.* 50, 90-97. <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.06.008>
- Coleman, J. 1990. Social Capital in: Coleman, J.S. (Ed), *Foundations of social Theory.* The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 300-321. <http://dx.doi.org/10.2307/2579680>.
- Coleman, J. 2000. Social Capital in the Creation of Human Capital. *Knowledge and Social Capital*, 94, 17–41. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7222-1.50005-2>
- Guillen, A.L., Wallin, I., dan Brukas, V. 2015. Social capital in small-scale forestry: A local case study in Southern Sweden. *Forest Policy and Economics.* 53, 21–28. <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.12.006>
- Hardjanto, Hero, Y., dan Soni, T. 2012. Desain Kelembagaan Usaha Hutan Rakyat untuk Mewujudkan Kelestarian Hutan dan Kelestarian Usaha dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan Institutional Design on People Forest to Establish Forest and Business Sustainability In Order to Poverty. *Ilmu Pertanian Indonesia*, 17(Agustus), 103–107.
- Harshaw, H.W., Tindall, D.B. 2005. Social structure, identities, and values: a network approach to understanding people's relationship to forests. *Journal of Leisure Research.* 4, 426-449.

- Hyakumura, K., Inoue, M. 2006. The significance of social capital in local forest management in Laos: overcoming latent conflict between local people and local forestry official. *Int. J. Sustain. Dev. World Ecol.* 13, 16-24. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.11.003>.
- Maguire, B., Potss, J., Fletcher, S. 2012. The role of stakeholder in the marine planning process-stakeholder analysis within the solent, united kingdom. *Marine Policy.* 36, 246-257. <http://doi:10.1016/j.marpol.2011.05.012>.
- Mifsud, G. E., Secco, L., and Pisani, E. 2016. Exploring the interlinkages between governance and social capital: A dynamic model for forestry. *Forest Policy and Economics.* 65, 25-36. <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2016.01.006>.
- Murtazashvili, I., Murtazashvili, J., Salahodjaev, R. 2019. Trust and deforestation: A cross-country comparison. *Forest Policy and Economics.* 101, 111-119. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.02.001>
- Nasution, A. 2016. Peranan Modal Sosial Dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga Di Perdesaan Indonesia (The Role of Social Capital on Household Poverty Reduction in Rural Areas of Indonesia), 171–183.
- Nopiansyah, F. 2017. Penguatan Kelembagaan Lokal Pengelolaan Sumberdaya Alam Sumber Penghidupan Suku Mentawai Di Cagar Biosfer Pulau Siberut. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Paletto, A., Ferretti, F., Meo, D. I. 2012. The role of social network in forest landscape planning. *Forest Policy and Economics.* 15, 132-139. <http://doi:10.1016/j.forpol.2011.11.007>.
- Prell, C., Hubacek, K., Reed, M., 2009. Stakeholder analysis and social network analysis in natural resource management: *Society and natural resource.* 22, 501-518.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work. Civic Traditions in modern Italy.* Princeton University Press. Princeton.
- Puspitojati, T., Fauziah Eva, Mile, M. Y., dan Darusman, D. 2010. *Hutan Rakyat Sumbangsih Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan Tanaman.* (Bahruni, Ed.). PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI).
- Suharjito, D., & Saputro, G. E. 2008. Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul (Social capital of forest resource management on Kasepuhan Community, Banten Kidul). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 5(1).
- Syahra, R. 2004. Modal sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0091-1>.